

**ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH  
KINERJA KEUANGAN PADA PERTUMBUHAN EKONOMI  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI**

**Ni Wayan Sukarmi<sup>1</sup>  
IGA Nyoman Budiasih<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia  
email: kayan-kayun22@yahoo.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini dimaksudkan agar diketahui peran kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap laju peningkatan perekonomian dengan interaksi pengalokasian biaya modal sebagai variabel moderasi. Data penelitian bersumber dari laporan realisasi keuangan pemerintah daerah se Provinsi Bali periode 2009 sampai dengan 2013 dan merupakan data sekunder. Hipotesis penelitian diuji dengan *moderated regression analysis* (MRA). Uji regresi moderasi hasilnya menunjukkan secara umum alokasi belanja modal memperkuat pengaruh kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi. Secara khusus interaksi alokasi belanja modal memperkuat pengaruh tingkat ketergantungan keuangan dan kemandirian keuangan pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengaruh desentralisasi, efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) dan derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada pertumbuhan ekonomi interaksi alokasi belanja modal menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Dari hasil uji regresi linear berganda diketahui bahwa desentralisasi, ketergantungan keuangan, efektifitas PAD, kemandirian keuangan, dan kontribusi BUMD tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Upaya-upaya optimalisasi pengelolaan keuangan untuk meningkatkan penerimaan daerah harus terus ditingkatkan. Peningkatan PAD lebih efektif memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah harus memiliki standar untuk menilai tingkat kesuksesan dalam penerimaan daerah dan pemanfaatannya bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi

**ABSTRACT**

The purpose of this research is intended to note the role of the financial performance of local governments to the rate of increase in the economy by allocating interactions capital costs as a moderating variable. The research data source of reports on realization of local government finances se Bali Province the period 2009 to 2013 and a secondary data. The research hypothesis was tested by moderated regression analysis (MRA). Regression test results indicate the general moderation of expenditure allocation of financial performance modal memperkuat influence on economic growth. In particular interaction capex strengthen the influence of the level of financial dependence and financial independence on economic growth. While the influence of decentralization, the effectiveness of local revenue (PAD) and the degree of contribution of the Regional Owned Enterprises (enterprises) to the interaction of economic growth capex showed no significant results. From the results of multiple linear regression test known that decentralization, financial dependence, the effectiveness of PAD, financial independence, and the contribution of enterprises have no effect on economic growth. Efforts to optimize financial management to improve the reception area should be improved. Increased revenue more effectively provide a stimulus for regional economic growth. The local government should have a standard to assess the level of success in the reception area and its use for the community.

*Keywords:* Financial Performance, Capital Expenditures, Economic Growth

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi merupakan antara lain dari banyaknya faktor-faktor yang kunci keberhasilan pembangunan. Kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi daerah tujuannya untuk menumbuhkan perekonomian daerahnya melalui peningkatan pendapatan. Faktor-faktor penting menurut Jhingan (2003) yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya potensi alam, pembentukan modal serta teknologi. Sularso dan Restianto (2011) menyatakan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kemandirian daerah yang ditunjukkan oleh kenaikan produk domestik regional bruto (PDRB).

Perkembangan PDRB masing-masing pemerintah daerah di Provinsi Bali kurun waktu 2009 sampai 2013 menunjukkan peningkatan yang bervariasi dan peningkatan cenderung terjadi pada kabupaten/kota yang memiliki potensi ekonomi besar, ditunjukkan pada Tabel.1 Kabupaten Badung, Kota Madya Denpasar dan Gianyar menjadi 3 (tiga) besar PDRB tertinggi periode tahun 2009 sampai dengan 2013 dengan dukungan dari sektor pariwisata. Sedangkan kabupaten/kota lainnya tidak menunjukkan perubahan yang mencolok. Hal ini memberikan gambaran kemampuan keuangan berperan penting dalam peningkatan PDRB suatu wilayah. Usaha pemerintah daerah dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi keuangan ditunjukkan oleh kinerja keuangan daerah (Sularso dan Restianto, 2011).

**Tabel.1**  
**PDRB se Provinsi Bali**  
**Tahun 2009 s.d 2013**

KABUPATEN/ KOTA	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
BULELENG	-	5.53	5.76	6.12	6.29
JEMBRANA	-	4.37	5.31	5.57	5.10
TABANAN	-	5.37	5.50	5.58	5.69
BADUNG	-	6.08	6.27	6.81	6.03
GIANYAR	-	5.70	6.33	6.36	6.04
BANGLI	-	4.74	5.52	5.65	5.32
KLUNGKUNG	-	5.15	5.49	5.69	5.40
KARANGASEM	-	4.85	4.93	5.42	5.49
DENPASAR	-	6.17	6.34	6.70	6.14
JUMLAH	-	47.95	51.46	53.89	51.49

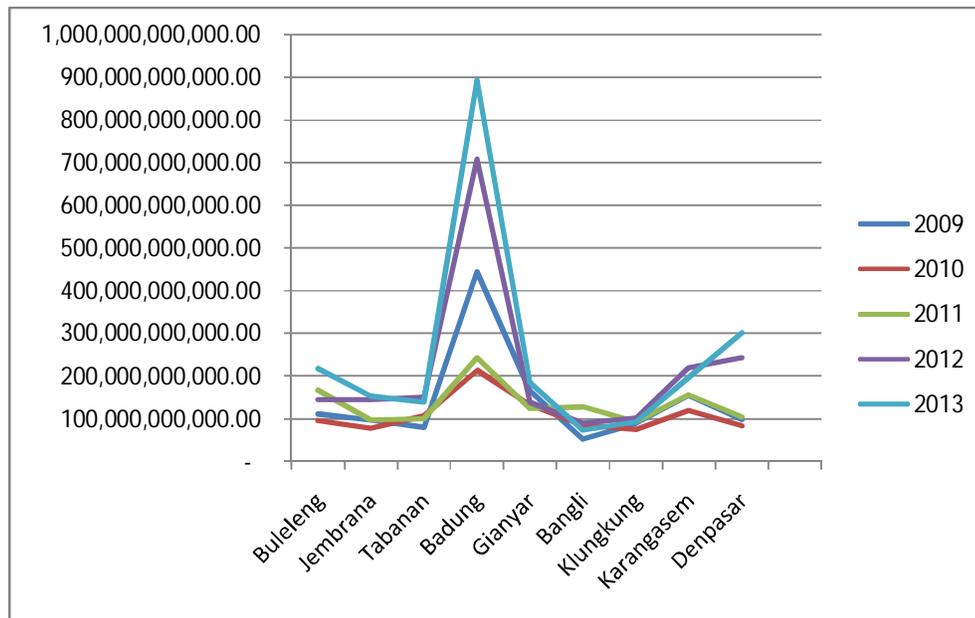
*Sumber:* Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tahun 2015 (data diolah)

Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan kemampuan daerah memanfaatkan PAD untuk mendukung operasional sistem pemerintahan dan pembangunan daerah dengan meminimalkan ketergantungan kepada pemerintah pusat (Syamsi, 1986 dalam Susantih, 2009). Pengelolaan yang baik memaksimalkan manfaat potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat dialokasikan lebih besar untuk pelayanan publik.

Porsi alokasi anggaran untuk belanja modal dalam APBD tahun 2009 sampai dengan 2013 rata-rata hanya 25 persen (Sugiyono, 2014). Alokasi belanja masing-masing pemerintah daerah (pemda) dalam lingkup Provinsi Bali dari tahun 2009 s.d 2013 dirangkum dalam Gambar.1 menunjukkan bahwa belanja modal tiap-tiap pemda Provinsi Bali 2009 sampai dengan 2013 nilainya beragam. Hanya Kabupaten Badung yang menunjukkan alokasi belanja modalnya cukup besar. Hal ini tidak lepas dari penerimaan pendapatan Kabupaten Badung yang jauh diatas kabupaten lainnya, sehingga tahun 2009 mampu mengalokasikan dananya untuk

Ni Wayan Sukarmi, IGAN Budiasih,. Alokasi Belanja Modal sebagai.....

belanja modal sebesar Rp.445.014.330.299,00 dan kemudian di tahun 2013 mencapai nilai sebesar Rp.892.674.898.532,00.



Gambar 1. Grafik Belanja Modal Pemerintah Daerahse Provinsi BaliTahun 2009-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Pendapatan daerah dan ketersediaan prasarana merupakan kontribusi dari PAD. Pengeluaran untuk membiayai penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur kontribusi PAD tidak mampu berperan banyak. Menurut Kurniawan dkk (2012) PAD kurang mampu berperan pada penyediaan asset dan laju tumbuhnya perekonomian. Efek pertumbuhan pengeluaran pemerintah negara-negara berkembang menunjukkan bahwa porsi belanja modal pemerintah dalam PDB positif dan signifikan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi (Yosafat dkk, 2000 dan Niloy dkk, 2003).

Fokus penelitian ini untuk membuktikan secara empiris kemampuan alokasi belanja modal dalam memperkuat pengaruh kinerja keuangan pada pertumbuhan

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seperti dijelaskan sebelumnya dipengaruhi banyak faktor, tetapi penelitian ini menggunakan kinerja keuangan diukur berdasarkan desentralisasi, tingkat ketergantungan keuangan, efektifitas PAD, tingkat kemandirian keuangan dan kontribusi BUMD. Alokasi belanja modal tergolong belanja pembangunan dan bersifat produktif diduga dapat memperkuat pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB. Menurut Lewis (2003) desentralisasi dapat membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif tinggi. Sifat ambiguhubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan penelitian Vazquez dan McNab (2003).

Permasalahan penelitian dirumuskan dengan dasar uraian latar belakang, antara lain: Apakah pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel-variabel kinerja keuangan (rasio desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas PAD, rasio kemandirian keuangan dan rasio kontribusi BUMD). Apakah interaksi alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas, rasio kemandirian keuangan dan rasio kontribusi BUMD pada pertumbuhan ekonomi?

Tujuan penelitian untuk membuktikan secara empiris pengaruh kinerja pemda se Bali terhadap peningkatan perekonomian sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini hasilnya diharapkan secara praktis bermanfaat sebagai informasi dan sumbangan pemikiran kepada pemerintah kabupaten/kota di dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyusunan dan realisasi APBD untuk lebih meningkatkan efektifitas dan

Ni Wayan Sukarmi, IGAN Budiasih,. Alokasi Belanja Modal sebagai.....

efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu diharapkan dapat menjadi bahan informasi pihak-pihak yang ingin mendalami keuangan daerah dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

Upaya pemerintah mewujudkan visi, misi, sasaran juga tujuan ditunjukkan dari Kinerja yang merupakan pencapaian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan (Sularso dan Restianto, 2011). Kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik sering terjadi dan menimbulkan ketidak harmonisan pemerintah dengan masyarakat. Secara teori, pengukuran kinerja dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori pensinyalan. Teori keagenan memberikan gambaran hubungan agen dan prinsipal. Teori pensinyalan mampu menunjukkan bahwa laporan keuangan yang baik adalah sinyal organisasi telah beroperasi dengan baik.

Menurut Kalalo dkk(2014) kinerja keuangan memberikan gambaran kondisi keuangan dan kemampuan pemerintah dalam menggali dan memanfaatkan dana untuk pembangunan. Kinerja keuangan pemerintah menurut Sularso dan Restianto(2011) dapat diukur diantaranya dengan rasio derajat desentralisasi, rasio tingkat ketergantungan keuangan, rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio kontribusi BUMD.

Pembangunan dan pelayanan publik berkaitan dengan alokasi anggaran pengeluaran pemerintah dalam bentuk pengeluaran modal diantaranya tanah, peralatan, bangunan, jalan-jalan, saluran air dan belanja fisik lainnya. Halim dan Abdullah, 2006 menyatakan alokasi belanja modal erat kaitannya dengan ketersediaan pendanaan dari pendapatan daerah. Menurut Sularso dan Restianto

(2011), pertumbuhan ekonom dipengaruhi anggaran belanja modal. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan alat analisis *structural equation modeling* (SEM).

Penelitian Yuana (2014) menyatakan kinerja keuangan berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemandirian dan efektivitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan regional melalui pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk time series dan metode analisis jalur (*Path Analysis*).

Nishimura(2007) menunjukkan hubungan negatif signifikan antara desentralisasi fiskal dan volatilitas ekonomi, serta menunjukkan hubungan yang kuat ketika memperhitungkan endogenitas desentralisasi fiskal. Menurut Oates (2003) desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kajian tersebut disusun hipotesis seperti dibawah ini:

H<sub>1</sub>: Rasio derajat desentralisasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Tingginya proporsi dana perimbangan dibandingkan PAD menunjukkan sumber pendapatan daerah dari transfer pusat masih tinggi (Harianto dan Priyo, 2010). Adi(2014) menyatakan ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat cukup tinggi. Sesuai dengan kajian diatas kemudian disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Ni Wayan Sukarmi, IGAN Budiasih,. Alokasi Belanja Modal sebagai.....

Proporsi dana perimbangan menurut Adi (2006) mendominasi sumber-sumber pendapatan dibandingkan penerimaan daerah lainnya. Peningkatan PAD menurut Saragih (2003) menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Kajian-kajian tersebut menjadi dasar hipotesis ketiga.

H<sub>3</sub>: Rasio efektifitas PAD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kalalo dkk (2014) menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah masih rendah. Kemandirian daerah diukur berdasarkan kemampuan menggali dan mengelola keuangannya (Yustika, 2008). Berdasarkan kajian empiris tersebut dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Kalalo dkk (2014) menunjukkan rasio kontribusi BUMD Pemerintah Kota Manado dapat dikatakan baik karena setiap tahunnya mengalami peningkatan. Laba BUMD Kabupaten Kepulauan Sula menurut Soamole (2013) meningkat dari tahun 2009, 2010 dan 2011 sebagai hasil usaha efektifitas dan efisiensi perusahaan-perusahaan daerah yang ada. Kajian teoritis tersebut kemudian mendasari dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Rasio derajat kontribusi BUMD berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Alokasi belanja modal yang tergolong belanja pembangunan dan bersifat produktif diduga dapat memperkuat pengaruh kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi. Halim dan Abdullah (2006), menunjukkan alokasi belanja modal erat hubungannya dengan pendapatan daerah. Hidayat (2007) menyatakan kontribusi PAD tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional setelah

otonomi daerah. Kurniawan (2012) menyatakan kontribusi PAD terhadap pendapatan APBD memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal namun tidak signifikan. Sesuai dengan uraian tersebut disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>6</sub>: Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio desentralisasi pada pertumbuhan ekonomi.

Muis (2012) menyatakan PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Pengaruh kinerja keuangan secara tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi (Sularso dan Restianto, 2011). Berdasarkan kajian empiris di atas disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>7</sub>: Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio ketergantungan keuangan pada pertumbuhan ekonomi.

Kajian korelasi PAD dengan belanja modal dilakukan oleh Oktora dan Pontoh (2012) yang menyatakan terdapat hubungan yang kurang erat, akibat rendahnya proporsi PAD dalam komposisi pendapatan daerah. Keputusan alokasi dana untuk modal bergantung pada dana yang tersedia (Abdullah dan Halim, 2006). Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>8</sub>: Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio efektifitas PAD pada pertumbuhan ekonomi.

Zao (1994) menunjukkan bahwa pemerintah pusat berupaya membantu daerah dengan meningkatkan transfer dana ke daerah tidak berhasil meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur. Bukti empiris hubungan positif antar variabel

Ni Wayan Sukarmi, IGAN Budiasih,. Alokasi Belanja Modal sebagai.....

desentralisasifiskaldan pertumbuhan ekonomi menurut Aristovnik (2012) adalah ambigu. Bukti tersebut menguatkan dugaan ada variabel lain yang dapat mempengaruhi hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kajian empiris diatas disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H9: Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio kemandirian keuangan pada pertumbuhan ekonomi.

Peran BUMD sebagai alat otonomi daerah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, tanpa meninggalkan fungsi sosialnya (Joedo dan Nugroho, 2006). Kajian BPK Perwakilan Provinsi Banten/Umum bahwa BUMD belum maksimal memberikan kontribusi bagi PAD. Berdasarkan uraian tersebut disusun hipotesis sebagai berikut:

H10: Alokasi belanja modal memperkuat pengaruh rasio kontribusi BUMD pada pertumbuhan ekonomi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan data sekunder berupa data APBD kabupaten/kota se-Bali dan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yaitu PDR Batas dasar harga konstan dengan metode statistik *moderated regression analysis* (MRA). Model regresi untuk menguji pengaruh langsung hipotesis 1, 2, 3, 4 dan 5 seperti pada persamaan 1.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Persamaan regresi untuk menguji hipotesis 6, 7, 8, 9 dan 10 seperti persamaan 2.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_1 X_6 + \beta_8 X_2 X_6 + \beta_9 X_3 X_6 + \beta_{10} X_4 X_6 + \beta_{11} X_5 X_6 + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

Y: Pertumbuhan ekonomi

$X_1$ : Variabel rasio derajat desentralisasi kinerja keuangan daerah

$X_2$ : Variabel rasio ketergantungan keuangan kinerja keuangan daerah

$X_3$ : Variabel rasio efektivitas PAD kinerja keuangan daerah

$X_4$ : Variabel rasio kemandirian keuangan kinerja keuangan daerah

$X_5$ : Variabel rasio derajat kontribusi BUMD keuangan kinerja keuangandaerah

$X_6$ : Variabel alokasi belanja modal daerah

$\alpha$ : Konstanta

$\beta$ : Koefisien regresi

$\varepsilon$ : Error

$X_1X_6$ : Interaksiantara variabel rasio derajat desentralisasi kinerja keuangan daerah dengan variabel alokasi belanja modal daerah

$X_2X_6$ : Interaksiantara variabel rasio ketergantungan keuangan kinerja keuangan daerah dengan variabel alokasi belanja modal daerah

$X_3X_6$ : Interaksiantara variabel rasio efektivitas PAD kinerja keuangan daerah dengan variabel alokasi belanja modal daerah

$X_4X_6$ : Interaksiantara variabel rasio kemandirian keuangan kinerja keuangan daerah dengan variabel alokasi belanja modal daerah

$X_5X_6$ : Interaksiantara variabel rasio derajat kontribusi BUMD keuangan kinerja keuangan daerah dengan variabel alokasi belanja modal daerah

Menyamakan persepsi dan menghindari kesalahan pemahaman maka disampaikan definisi variabel-variabel independen (kinerja keuangan) dan dependen (pertumbuhan ekonomi) dan variabel moderasi penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Rasio desentralisasi merupakan perbandingan PAD dengan total pendapatan daerah.
- 2) Rasio tingkat ketergantungan keuangan merupakan total penerimaan transfer dibandingkan dengan jumlah penerimaan daerah.
- 3) Rasio efektifitas PAD adalah perbandingan rencana penerimaan PAD dengan target yang ditetapkan disesuaikan sumber-sumber riil pendapatan daerah.
- 4) Rasio kontribusi BUMD menggambarkan peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah (Sularsodan Restianto, 2011).

Ni Wayan Sukarmi, IGAN Budiasih,. Alokasi Belanja Modal sebagai.....

- 5) Alokasi belanja modal adalah lokasi dan yang digunakan dalam mendapatkan asset yang memiliki kegunaan lebih dari satu tahun dibandingkan dengan jumlah pengeluaran dalam APBD.
- 6) Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan nominal besarnya tingkat pertumbuhan PDRB suatu daerah atas dasar harga konstan (Sularso dan Restianto, 2011).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Regresi linear berganda bermanfaat untuk melihat pengaruh masing-masing variabel kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi, persamaan hasil uji regresi seperti dibawah ini:

$$Y = 7,429 + 0,022X_1 - 0,021X_2 - 0,001X_3 - 0,004X_4 - 0,054X_5 - 0,003X_6$$

Persepsikan dari persamaan tersebut bahwa jika masing-masing variabel kinerja keuangan diasumsikan konstan, besaran peningkatan ekonomi yang terjadi adalah 7,429 satuan. Apabila rasio desentralisasi naik satu satuan dan variabel-variabel kinerja keuangan lainnya (tingkat ketergantungan keuangan, efektifitas PAD, tingkat kemandirian keuangan, derajat kontribusi BUMD) diasumsikan konstan, maka terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,022 satuan. Nilai koefisien rasio tingkat ketergantungan sebesar -0,021 berarti jika rasio tingkat ketergantungan turun satu satuan dan variabel-variabel kinerja keuangan lainnya (derajat desentralisasi, efektifitas PAD, tingkat kemandirian keuangan, derajat kontribusi BUMD) diasumsikan konstan, maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,021 satuan. Koefisien rasio efektifitas PAD adalah -0,001 berarti rasio efektifitas PAD turun satu satuan dan variabel-variabel kinerja

keuangan lainnya (derajat desentralisasi, tingkat ketergantungan keuangan, tingkat kemandirian keuangan, derajat kontribusi BUMD) diasumsikan tetap, maka pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,001 satuan.

Koefisien rasio kemandirian keuangan nilainya -0,004, memiliki arti jika rasio kemandirian keuangan turun satu satuan dan variabel-variabel kinerja keuangan lainnya (derajat desentralisasi, efektifitas PAD, tingkat ketergantungan keuangan, derajat kontribusi BUMD) diasumsikan tetap, maka pertumbuhan ekonomi naik 0,004 satuan. Koefisien rasio derajat kontribusi BUMD nilainya -0,054 berarti apabila rasio derajat kontribusi BUMD turun satu satuan dan variabel-variabel kinerja keuangan lainnya (derajat desentralisasi, efektifitas PAD, tingkat ketergantungan keuangan, tingkat kemandirian keuangan) diasumsikan tetap, maka pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,054 satuan. Koefisien rasio alokasi belanja modal sebesar 0,003 berpengaruh positif terhadap pertumbuhan pembangunan. Apabila alokasi belanja modal naik satu satuan maka pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,003 satuan.

Analisis selanjutnya untuk mengetahui interaksi alokasi belanja modal terhadap pengaruh variabel-variabel kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi digunakan MRA. Analisis ini menerapkan analisis dengan mempertahankan integritas sampel dan sebagai dasar kontrol pengaruh variabel moderator (Ghozali, 2011). Dari hasil uji regresi moderasi dapat disusun seperti berikut:

$$Y = 10,100 + 0,022X_1 - 0,021X_2 - 0,001X_3 - 0,004X_4 - 0,054X_5 + 0,003X_6 + 0,002X_1X_6 + 0,005X_2X_6 - 0,002X_3X_6 + 0,001X_4X_6 - 0,006X_5X_6$$

Ni Wayan Sukarmi, IGAN Budiasih,. Alokasi Belanja Modal sebagai.....

Konstanta 10,100 berarti interaksi alokasi belanja modal terhadap pengaruh rasio desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas PAD, rasio kemandirian dan rasio derajat kontribusi BUMD dalam kondisi konstan mampu mendorong laju pertumbuhan PDRB sebesar 10,100 satuan. Koefisien interaksi alokasi belanja modal terhadap pengaruh rasio desentralisasi sebesar 0,002 berarti jika rasio desentralisasi naik sebesar satu satuan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,002 satuan.

Nilai koefisien interaksi alokasi belanja modal terhadap pengaruh rasio tingkat ketergantungan sebesar 0,005 berarti setiap interaksi alokasi belanja modal terhadap rasio tingkat ketergantungan mendorong peningkatan ekonomi sebesar 0,005 satuan. Koefisien interaksi antara rasio efektifitas PAD dengan alokasi belanja modal sebesar -0,002 menunjukkan interaksi rasio efektifitas PAD dengan alokasi belanja modal menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,002 satuan. Koefisien interaksi alokasi belanja modal dengan rasio kemandirian keuangan sebesar 0,001 indikasinya setiap interaksi alokasi belanja modal dengan rasio kemandirian keuangan maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,001 satuan.

Nilai koefisien interaksi rasio derajat kontribusi BUMD dengan alokasi belanja modal sebesar -0,006 mengindikasikan setiap interaksi rasio derajat kontribusi BUMD dengan alokasi belanja modal turun satu satuan, perekonomian tumbuh sebesar 0,006 satuan.

Variasi variabel dependendiukur dengan uji determinasi ( $R^2$ ). Hasil uji menunjukkan model layak untuk digunakan. Untuk menunjukkan

pengaruh variabel kinerja keuangan yang digunakan dalam model dalam menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi digunakan uji F dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel-variabel kinerja keuangan dan belanja modal serta interaksi variabel-variabel kinerja keuangan dengan alokasi belanja modal mampu menjelaskan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat digunakan uji t (Kusumadilaga, 2010). Berdasarkan uji t menunjukkan nilai signifikansi (Sig.t) 0,263 lebih besar dari 0,050 ( $\alpha=5\%$ ) artinya rasio derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis  $H_1$  ditolak. Hasil tersebut menunjukkan implementasi desentralisasi belum memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah khususnya untuk kabupaten/kota di Provinsi Bali. Interaksi alokasi belanja modal terhadap pengaruh derajat desentralisasi pada pertumbuhan ekonomi nilai signifikansinya 0,385 lebih besar dari 0,050 ( $\alpha=5\%$ ), dan hipotesis ditolak. Hal tersebut berarti alokasi belanja modal tidak mampu memperkuat interaksi rasio derajat desentralisasi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh variabel rasio ketergantungan keuangan daerah pada pertumbuhan ekonomi nilai signifikansinya 0,218 lebih lebih besar dari 0,050 sehingga hipotesis ditolak. Hal tersebut menunjukkan rasio ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan interaksi alokasi belanja modal terhadap pengaruh ketergantungan keuangan pada pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi 0,050 sama dengan  $Los$  (*level of significance*)

Ni Wayan Sukarmi, IGAN Budiasih,. Alokasi Belanja Modal sebagai.....

0,050. Hipotesis diterima karena hasil uji hopitesis menunjukkan alokasi belanja modal memperkuat interaksi rasio tingkat ketergantungan keuangan pada pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh variabel rasio efektifitas PAD pada pertumbuhan diperoleh nilai signifikansi 0,838 lebih besar dari 0,050 hipotesis ditolak. Efektifitas PAD tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah. Iteraksi alokasi belanja modal terhadap pengaruh efektifitas PAD pada pertumbuhan ekonomi nilai signifikansinya 0,253 lebih besar dari 0,050 dan hipotesis ditolak. Jadi alokasi belanja modal tidak mampu memoderasi interaksi alokasi belanja modal terhadap pengaruh efektifitas PAD pada pertumbuhan ekonomi.

Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas 0,072 lebih besar dari 0,050 dan hipotesis ditolak. Hal tersebut berarti kemandirian keuangan tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan interaksi alokasi belanja modal terhadap pengaruh kemandirian keuangan daerah pada pertumbuhan ekonomi nilai signifikansinya 0,031 kurang dari 0,050 dan hipotesis diterima. Hasil tersebut menunjukkan alokasi belanja modal mampu memperkuat pengaruh interaksi kemandirian keuangan daerah pada pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh rasio derajat kontribusi BUMD pada pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi 0,077 lebih besar dari 0,050 dan hipotesis ditolak. Hal tersebut berarti derajat kontribusi BUMD tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pengujian hipotesis interaksi alokasi belanja modal terhadap pengaruh derajat kontribusi BUMD pada pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi

0,256 lebih besar dari 0,050 dan hipotesis ditolak. Berarti alokasi belanja modal tidak mampu memoderasi interaksi derajat kontribusi BUMD pada pertumbuhan ekonomi.

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan indikator derajat desentralisasi, tingkat ketergantungan keuangan, efektifitas PAD, tingkat kemandirian keuangan dan derajat kontribusi BUMD tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Penggunaan kebijakan alokasi belanja modal sebagai pemoderasi menunjukkan bahwa alokasi belanja modal mampu memperkuat interaksi derajat desentralisasi, efektifitas PAD dan derajat kontribusi BUMD pada pertumbuhan ekonomi. Belanja modal dapat menambah volume ekonomi daerah. Meningkatnya volume ekonomi berpengaruh pada produktivitas perekonomian. Produktivitas ekonomi meningkat dampaknya pada peningkatan penerimaan pendapatan bagi daerah. Hasil uji hipotesis interaksi tingkat ketergantungan keuangan dan tingkat kemandirian keuangan dengan alokasi belanja modal pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan alokasi belanja modal dapat berperan sebagai variabel moderasi. Pengaruh tiap-tiap variabel dijelaskan seperti berikut:

1) Derajat desentralisasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi

Desentralisasi pada dasarnya merupakan pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk membuat kebijakan terkait pemberian pelayanan, meningkatkan partisipasi, pemberdayaan dan prakarsa masyarakat. Indikasi hal ini desain desentralisasi fiskal di Indonesia saat ini yang menitikberatkan pada sisi

pengeluaran, dan inti dari otonomi pengelolaan fiskal daerah adalah keleluasaan membelanjakan dana sesuai prioritas dan kebutuhan masing masing daerah, sehingga pengaruh belanja daerah terhadap kinerja perekonomian daerah akan sangat tergantung pada alokasi dan komposisi belanja daerah. Jadi untuk menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya pemda harus didukung potensi yang memadai.

Hasil penelitian ini mendukung kajian Thoroton (2007) bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, terutama pada pemerintahan dengan pendapatan yang terbatas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Prabowo (2012) yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan daerah menunjukkan rasio desentralisasi yang masih rendah.

Masuknya kebijakan alokasi belanja modal tidak mampu memoderasi pengaruh derajat desentralisasi pada pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan penelitian Muis (2012) menyatakan PAD berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Alokasi belanja modal tidak memoderasi pengaruh derajat desentralisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mendukung penelitian Waluyo (2007) yang menyatakan perekonomian tumbuh lebih baik di wilayah yang memiliki potensi alam berlimpah serta didukung kebijakan desentralisasi dibidang keuangan Daerah dengan potensi ekonomi tinggi akan mampu meningkatkan penerimaan PAD.

Desentralisasi fiskal memberi peluang sangat luas bagi daerah dalam mengelola dan memanfaatkan dana yang diterima sebesar-besarnya untuk

keperluan masyarakat. Hasil ini mendukung data Kementerian Dalam Negeri dalam Sugiyono (2014) bahwa porsi alokasi anggaran APBD tahun 2009 sampai dengan 2013 alokasi untuk belanja modal rata-rata hanya 25 persen, sedangkan menurut Fajar (2013) tumbuhnya perekonomian dipengaruhi rasio alokasi pengeluaran untuk modal. Hal tersebut juga mendukung pendapat Halim dan Abdullah (2006) bahwa belanja modal erat kaitannya dengan tersedianya dana dari pendapatan daerah.

2) Ketergantungan keuangan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pengujian hipotesis secara statistik menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah. Implementasi pendapatan daerah sebagian besar bersumber dari transfer pemerintah pusat, menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Bali masih sangat membutuhkan peran pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari desain desentralisasi di Indonesia yang disusun di sisi pengeluaran melalui instrumen transfer ke daerah, dan demi terjaganya kesatuan bangsa maka sumber-sumber pendapatan negara yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak tetap dibawah kekuasaan pusat.

Berdasarkan kebijakan otonomi, pemerintah daerah diharapkan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat mendorong peningkatan penerimaan PAD. Adi (2006) menunjukkan adanya indikasi untuk tetap mempertahankan transfer dari pemerintah pusat yang jumlahnya sangat besar.

Masuknya kebijakan alokasi belanja modal mampu memperkuat pengaruh tingkat ketergantungan keuangan pada pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal diperuntukkan bagitersedianya infrastruktur daerah. Dana yang digunakan untuk alokasi belanja modal berasal dari PAD, transfer dan pendapatan lainnyayang sah. Apabila belanja modal lebih besar dibiayai dari PAD maka daerah memiliki tingkat ketergantungan yang rendah.

Hasil penelitian ini juga mendukung pendapat *United Nations Development Programme* (UNDP) (2008) yang mengemukakan bahwa pola belanja aparatur atau belanja rutin dan pembangunan atau belanja langsung di daerah dapatmenumbuhkanpasar barang dan jasa yang mendukung terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

3) Rasio efektifitas PAD berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara statistik menunjukkan efektifitas PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendanaan lokal semestinya bersumber dari PAD. Pemerintah daerah harus lebih berkonsentrasi meningkatkan kemampuan untuk merealisasikan PAD sesuai rencana dan mengalokasikannya dengan porsi lebih besar untuk kebutuhan publik. Kontribusi PAD yang tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi disebabkan lebih banyak digunakan untuk memenuhi belanja rutin pemerintah daerah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Randa dan Paledung (2012) bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas belum efektif karena persentase rasio efektifitasnya belum maksimal (100%).

Kebijakan alokasi belanja modal belum mampu memoderasi interaksi rasio efektifitas PAD pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini diduga karena pendapatan daerah yang dialokasikan pada belanja modal dalam rangka menunjang program peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, jumlahnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan besarnya jumlah penduduk. Kondisi ini juga diduga disebabkan karena dalam proses penyusunan anggaran belanja modal yang melibatkan pihak eksekutif dan legislatif memungkinkan terjadinya distorsi pengalokasian belanja modal.

Hasil pengujian hipotesis mendukung penelitian Kurniawan dkk (2011) bahwa kontribusi PAD terhadap alokasi belanja modal tidak signifikan dan pengaruh alokasi belanja modal juga tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Efektivitas PAD merupakan salah satu komponen dari kinerja keuangan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengalokasian belanja modal.

4) Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian hipotesis pengaruh kemandirian keuangan pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan kontribusi PAD lebih besar dari kontribusi pendapatan lainnya. Pemerintah daerah kabupaten/kota se Provinsi Bali masih bergantung pada pemerintah pusat maupun provinsi dalam pembelajaan daerahnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kalalo dkk (2014) bahwa kemandirian keuangan daerah masih rendah.

Alokasi belanja modal sebagai pemoderasi dari hasil pengujian hipotesis secara statistik ternyata mampu memperkuat interaksi pengaruh kemandirian keuangan pada pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai PAD yang merupakan representasi dari kemandirian daerah, maka daerah mempunyai lebih banyak sumber dana untuk membiayai belanja pembangunannya, dimana belanja pembangunan merupakan bentuk dari investasi yang menjadi determinan penting bagi laju peningkatan perekonomian.

Ariani (2010) yang menyatakan dana untuk penyediaan asset berkaitan dengan kemampuan daerah sehingga dapat daerah dapat dikatakan mandiri atau tidak. Kemandirian keuangan daerah diwujudkan dengan kontribusi PAD lebih besar untuk alokasi belanja daerah daripada kontribusi dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah. Semakin besar PAD maka peluang untuk meningkatkan hubungan belanja modal dan kemandirian keuangan daerah juga semakin besar

5) Rasio derajat kontribusi BUMD berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Pengujian hipotesis pengaruh derajat kontribusi BUMD pada pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Secara teori, semakin tinggi kontribusi BUMD yang diterima diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, memberikan peluang semakin besar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dari BUMD tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini lebih disebabkan, kondisi dari sebagian besar perusahaan daerah masih belum mampu memberikan

keuntungan yang diharapkan. Dana yang dikeluarkan untuk penyertaan kepada perusahaan daerah belum mampu memberikan kontribusi yang diharapkan dalam PAD. Hal ini mendukung pendapat Puradi (2002) bahwa peran PD/BUMD terhadap perekonomian daerah diukur dari nilai kontribusinya terhadap PDRB. Belum optimalnya kontribusi BUMD disebabkan lemahnya kinerja BUMD sehingga sering menderita kerugian.

Interaksi alokasi belanja modal dalam memperkuat pengaruh kontribusi BUMD pada pertumbuhan ekonomi dari hasil uji hipotesis hasilnya tidak signifikan. Kondisi ini disebabkan sebagian besar perusahaan daerah masih belum mampu memberikan keuntungan yang diharapkan.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Sesuai dengan hasil analisis juga hasil bahasan ditarik kesimpulan seperti berikut, hasil analisis variabel-variabel kinerja keuangan daerah pada pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Bali, yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi didapatkan bahwa tumbuhnya ekonomi di daerah tidak signifikan dipengaruhi desentralisasi di bidang keuangan. Indikasi dari hal tersebut bahwa upaya meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum efektif dalam memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Boleh jadi karena upaya tersebut lebih berorientasi pada peningkatan jumlah PAD yang dipungut, dan bukannya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Nilai estimasi koefisien interaksi alokasi belanja modal dalam lingkup penelitian ini merupakan variabel quasi moderasi dalam interaksi alokasi belanja modal

Ni Wayan Sukarmi, IGAN Budiasih,. Alokasi Belanja Modal sebagai.....

terhadap pengaruh variabel-variabel kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi. Namun tidak memoderasi pengaruh derajat desentralisasi, efektifitas PAD dan derajat kontribusi BUMD pada pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal mampu secara signifikan memperkuat pengaruh rasio ketergantungan keuangan dan kemandirian keuangan pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan simpulan dapat disampaikan saran kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, bahwa dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka dalam konteks desentralisasi seyogyanya pemberian kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur belanja daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Peran PAD sangat penting bukan hanya nilai nominalnya tetapi juga kemampuannya untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Kepada Peneliti Berikutnya, dimana penelitian ini menggunakan data sekunder tanpa dilakukan konfirmasi dengan observasi langsung, wawancara dan kuesioner. Data yang digunakan dalam rentang waktu 2009 s.d 2013, dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode waktu. Disarankan juga untuk memilih variabel lainnya seperti karakteristik daerah berhubungan dengan potensi alam ataupun kompetensi pegawai, menambahkan instrumen kuesioner, pengamatan langsung atau wawancara dengan pihak-pihak terkait dan menambah waktu/periode penelitian. Hasil uji MRA penelitian ini menunjukkan nilai koefisien  $\beta$  dari interaksi antara variabel independen dengan variabel pemoderasi sangat kecil, peneliti berikutnya diharapkan memanfaatkan variabel lainnya dalam memprediksi laju pertumbuhan ekonomi daerah.

**REFERENSI**

Abdullah, S. dan Halim, A. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2 No. 2, November 2006. Hal. 17-32. Diakses dari <https://syukriy.wordpress.com/2008/10/20/studi-atas-belanja-modal-pada-anggaran-pemerintah-daerah-dalam-hubungannya-dengan-belanja-pemeliharaan-dan-sumber-pendapatan/>, tgl 8 feb 2015.

Aristovnik, A. 2012. *Fiscal decentralization in Eastern Europe: a twenty-year perspective*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Pembangunan Daerah Dalam Angka*.

Badan Pusat Statistik Bali. Bali Dalam Angka. Tahun 2009.

\_\_\_\_\_. Tahun 2010.

\_\_\_\_\_. Tahun 2011.

\_\_\_\_\_. Tahun 2012.

\_\_\_\_\_. Tahun 2013.

\_\_\_\_\_. Tahun 2014.

Badan Pemeriksa Keuangan. 2012. Peranan Badan Usaha Milik Daerah sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah. Diakses dari: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).

Faridi, M. Z. 2011. *Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan*. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)* Vol. 31, No. 1, Juni 2011, Hal. 1-13.

Hanu, L. 2006. *Perspektif Teori Kontijensi Dalam Sistem Akuntansi Manajemen Dan Sistem Pengendalian Manajemen*. Penerbit: Universitas Dharmawangsa.

Hidayat, M. F. 2013. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal*. *Jurnal Brawijaya*.

Jin, J dan Zou, H. 2005. *Fiscal Decentralization, Revenue and Expenditure Assignments, and Growth in China*. *Journal of Asian Economics*, Vol. 16, Issue 6, December 2005, Pages 1047-1064.

Joedo, H.S.M dan Nugroho, D.R. 2006. *Reinventing Badan Usaha Milik Daerah*. Penerbit: PT. Elex Media Komputindo.

Kalalo, N.P., Tinangon, J.J., dan Elim, I. 2014. *Pengukuran Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Manado*. *Jurnal EMBA* Vol.2 No.1 Maret 2014, Hal. 606-616, ISSN 2303-1174.

Ni Wayan Sukarmi, IGAN Budiasih,. Alokasi Belanja Modal sebagai.....

Kurnia, E. D dan Ananda, C. F.2013. *Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Kurniawan, A., Effendi, N., Wardhana, A. 2012. Analisis Alokasi Belanja Modal Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2004-2010. Diakses dari <http://pustaka.unpad.ac.id>.

Landau, D. 1983. *Government Expenditure and Economic Growth: a Cross-Country Study*. Southern Economic Journal, Vol. 49, No, 3, Pages. 783-92.

Lewis, B. 2003. *Tax and Charge Creation by Regional Governments under Fiscal Decentralisation: Estimates and Explanations*. Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol.2, Pages 39.

Mahi, B.R. 2009. *Geographical Concentration of Industries: The Impact of Governance and Investment Climate in Region. Coordinating Ministry of Economy*. Jakarta, 12 November.

Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makroekonomi*, (Fitria Liza dan Imam Nurmawan, Pentj). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Maryanti, E.S. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPKD Kota Di Sumatera Barat).

Maulida, A.T. 2014. "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2008-2011"(tesis). Universitas Widaytama. Badung.

Meckling, WH. dan Jensen, MC. 1976. *Theory of the Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics 3, 1976.

Wibisono, NN. dan Yuliana, Y. 2012. *Analisis Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat pada Kabupaten / Kota se Jawa Timur*. Jurnal Ekomaks Vol. 1. 1 Maret 2012. Universitas Merdeka Madiun.

Oktora, FE dan Pontoh, W. 2013. *Analisi Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Accountability Vol. 2. Pages. 1.

Pide, A. M.1997. *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Purwadi. 2002. *Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Surabaya: Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur.

- Rustiono, D. 2008. “Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah” (*tesis*), Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pauwah, S., Saerang, I., Mandey, S. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara*. Jurnal EMBA Vol. 2, No.3, Hal. 001-012.
- Pepinsky, T.B. & Wihardja, M.M. 2009. *Decentralization and Economic Performance in Indonesia. Working Paper, 2009*.
- Randa, F dan Paledung, S. 2013. *Memahami Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Fenomenologi pada Kabupaten Poso)*. Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Vol. 11, No. 1, hal. 53 – 81. Fakultas Ekonomi UAJ Makassar.
- Renyaaan, J.P.A, Ubud, S., Idrus, M.S., Djumahir. 2012. Effect of Fiscal Autonomy and Economic Growth on Local Financial Performance. *International Journal of Business and Management Invention*, Vol. 1 Issue 1, PP.16-21, December 2012, ISSN (Online): 2319 – 8028, [www.ijbmi.org](http://www.ijbmi.org).
- Ritonga, I.T., Clark, C., Wickremasinghe, G. 2012. *Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: an Exploration*. *Public and Municipal Finance*, Vol. 1, Issue 2, 2012.
- Riyanto dan Siregar, H. 2005. *Dampak Dana Perimbangan terhadap Perekonomian Daerah dan Pemerataan Antarwilayah*. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Vol I No 1.
- Ryass, R. 2002. *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan)*. Jakarta. PT. Mutiara Sumber Widya.
- Santoso dan Pambelum, 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud*.
- Saragih, JP. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sasana, H. 2011. *Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret 2011, Hal. 46 – 58. Vol. 18, No. 1.
- Setiyawati, A. dan Ardi, H. 2007. *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 4 No. 2 Hal. 211-228.
- Solikin, I. 2008. *Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat*.

Ni Wayan Sukarmi, IGAN Budiasih,. Alokasi Belanja Modal sebagai.....

Sjafii, A. Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004. Universitas Airlangga, Surabaya.

Sularso, H. dan Restianto, YE. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Media Riset Ekonomi. Purwokerto. Vol.1. Hal.109-124.

Sumarsono, H. 2009. *Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota Malang (1999 - 2004)*. JESP Vol. 1, No. 1.

Susantih, H. dan Saftiana, Y. 2008. "Perbandingan Indikator Efisiensi dan Efektivitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan" (*tesis*). Universitas Sriwijaya.

Suryarini ,T. 2012. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol.2 No. 1 : 207-216. ISSN: 2088-0685.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. Diakses: [www:djlpe.esdm.go.id](http://www.djlpe.esdm.go.id).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta. Diakses [ww:djlpe.esdm.go.id/modules](http://ww:djlpe.esdm.go.id/modules).

United Nations Development Programme (UNDP). 2008. Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007.

Vazquez, J. M. and Robert M. M. (2003). *Fiscal Decentralisation, Macrostability and Economic Growth*. Journal: World development. Vol. 3/9 Hal. 1597-1616.

Waluyo, J. 2007. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Indonesia*. Simposium Nasional Ekonomi PPIE FE UI, Wisma Makara-Kampus UI Depok, 2007.

Yovita, F.M dan Utomo, D.C. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Diakses dari: <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/oai>.

Yuana, A. P. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2012)*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya. Malang.